

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pengantar atau gambaran terkait penelitian-penelitian terdahulu tentang Kolaborasi antara 5 (lima) *stakeholders* atau disebut dengan *Penta Helix* dan dikenal dengan rumus *ABCGM* serta Pengembangan Pariwisata. Adapun penelitian-penelitian yang dijadikan tinjauan pustakanya adalah berupa artikel jurnal serta karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang sedang ditulis. Tinjauan pustaka ini juga akan memberikan gambaran perbedaan antara penelitian yang telah ada melalui artikel jurnal dan karya ilmiah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, serta memiliki nilai kebaruan dalam penelitian tersebut. Tinjauan pustaka ini juga akan melihat dua topik yang menjadi garis besar dalam penelitian ini yaitu Kolaborasi *ABCGM* dan Pengembangan Pariwisata.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga menggunakan model *ABCGM* atau *Penta Helix* dalam memetakan aktor yang berperan dalam mensukseskan sebuah program atau inovasi tertentu. Pemetaan aktor dilakukan guna untuk melihat seberapa besar pengaruh aktor atau *stakeholder* yang ikut berkolaborasi dalam program tersebut, sehingga dalam temuan ditemukan *stakeholder* mana yang akan sangat berpengaruh dalam pengembangan inovasi tertentu (Muhyi, 2017; Amrial, 2017; Hardianto; Calzada, 2018; Prabantarikso, 2017; Halibas, 2017).

Penelitian terkait dengan pengembangan pariwisata juga diteliti oleh (Fairuza, 2017; Tresiana, 2017; Hermawan, 2016; Rani, 2014) tetapi mereka hanya melihat pengaruh dari beberapa aktor atau *stakeholder* saja. Mereka hanya melihat peran dari pemerintah, masyarakat dan juga swasta. Penelitian yang mereka lakukan lebih kepada *collaborative governance* karena berkenaan dengan tiga aktor besar tersebut. Hasil penelitian mereka juga rata-rata menemukan *stakeholder* yang mempunyai peran besar dan sangat berpengaruh dalam pengembangan pariwisata di wilayah penelitian mereka.

Konsep *ABCGM* lebih cenderung digunakan untuk melihat pengembangan perkenomian atau melihat perkembangan di sektor industri. Pada dasarnya konsep *ABCGM* juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan di bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hal ini dikarenakan konsep *ABCGM* merupakan sebuah konsep yang didalamnya terdapat beberapa *stakeholder* yang menjadi bahan kajian untuk melihat peran dari masing-masingnya, sehingga konsep *ABCGM* dirasa bisa memenuhi keinginan penulis yang sedang melihat peran aktor-aktor tertentu dalam proses pengembangan program atau yang lainnya (Muhyi, 2017; Amrial, 2017; Hardianto; Iqbal, 2018; Simamora, 2016; Amalyah, 2016; Suryawan, 2016).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Jurnal/ Karya Tulis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Muhyi, H.A, Chan, A, Sukoco, I dan Herawaty, T. (2017). <i>The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City. Review of Integrative Business and Economics Research</i> , Vol. 6, no. 1. Hal: 412-417.	Penelitian ini menemukan lima pihak yang terlibat dalam mengembangkan pusat-pusat industri unggulan di Kota Bandung: akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah dan media. Masalah yang terjadi dalam hubungan di antara mereka (para pemangku kepentingan) adalah: pertama, kurangnya koordinasi; kedua: kurangnya komitmen, ketiga: efek ancaman lingkungan global, misalnya produk-produk Cina yang menciptakan kesulitan bagi pemilik industri unggulan. Kondisi ini mempengaruhi kinerja bisnis pusat industri unggulan. Oleh karena itu, tidak dapat membuat manfaat bagi pembangunan ekonomi lokal seperti yang diharapkan.	<p>Persamaan :</p> <p>Meneliti tentang kolaborasi lima stakeholder yang disebut dengan Penta Helix.</p> <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan eksploratif kualitatif. 2. Penelitian tersebut melihat perkembangan di sektor industri.
2	Amrial, Muhammad, A dan Muhamad, E. (2017). <i>Penta helix model: A sustainable development solution through the industrial sector</i> . Social and Human Sciences, ISSN: 2597-8640. Hal: 152-156.	Penelitian ini juga memberikan gambaran kerjasama di antara 5 sektor tersebut, sehingga hasil dari penelitian adalah peran dari pemerintah untuk melaksanakan kebijakan sehingga seluruh pengembangan kebijakan melalui penembangan sector industri bisa tercapai, dan juga membangun infrastruktur yang seimbang terutama di bidang pendidikan dan industri.	<p>Persamaan :</p> <p>Penelitian menggunakan model Penta Helix</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Penelitian tersebut berfokus kepada <i>sustainable development</i> di sektor industri.</p>
3	Fairuza, Mia. (2017). <i>Kolaborasi antar stakeholder dalam pembangunan</i>	Hasil dari penelitian ini adalah kolaborasi komponen yang kuat adalah pemahaman bersama dan mutualis. Di mana komponen mutualis dipicu oleh komponen	<p>Persamaan :</p> <p>Penelitian tersebut membahas tentang pariwisata</p>

	<p><i>inklusif pada sektor pariwisata (studi kasus wisata pulau merah di Kabupaten Banyuwangi).</i> Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017. Hal 1-13.</p>	<p>administrasi, yakni adanya kejelasan peran dari setiap <i>stakeholder</i>. Komponen pemahaman bersama, mutualis dan administrasi merupakan komponen yang menyebabkan kolaborasi tetap berjalan dan dapat mencapai tujuan inklusif meskipun sering terjadi konflik antar <i>stakeholder</i>.</p>	<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitiannya hanya melihat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. 2. Berfokus pada pembangunan inklusif.
4	<p>Tresiana, N dan Duadji, N (2017). <i>Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan</i>. Di sampaikan pada seminar nasional tentang “membangun etika sosial politik menuju masyarakat yang berkeadilan. FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung.</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di teluk Kialuan masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan kondisi masyarakat yang tidak kolaboratif, dan membutuhkan perubahan dalam strategi kebijakan melalui dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, manfaat langsung, penggunaan sumber daya lokal, penguatan kelembagaan lokal dan sinergi antar tingkat dan daerah.</p>	<p>Persamaan : Penelitian tersebut melihat tentang pengelolaan pariwisata.</p> <p>Perbedaan : Kolaborasi yang hanya melibatkan pemerintah, masyarakat dan swasta.</p>
5	<p>Hardianto, W.T, Sumartono, Muluk, MR. K dan Wijaya, A.F. <i>Tourism Investment Services In Batu City With Penta Helix Perspective</i>. International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS), Vol. 5, No. 05. Hal: 17-22.</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan kemudian universitas atau akademisi terlibat dalam studi akademik dan kritis untuk menentukan apakah investasi bisnis yang akan diadakan adalah tepat atau tidak, maka sektor swasta sebagai pemilik investasi modal pengembangan pariwisata, dan media / masyarakat, melalui publikasi yang baik dan terarah untuk tujuan Kota Batu yang didukung oleh masyarakat yang berperan dalam mendukung pengembangan pariwisata melalui organisasi yang saling terkait dan</p>	<p>Persamaan : Meneliti tentang kolaborasi Penta Helix</p> <p>Perbedaan : Penelitian tersebut lebih berfokus pada investasi pariwisata bukan pada pengelolaannya.</p>

		bersinergi dengan satu pihak ke pihak lain, dan pihak terakhir adalah lingkungan yang menjadi sumber daya dan juga sebagai kreatif analisis yang dapat memberikan penilaian dan umpan balik yang tidak merusak keseimbangan alam untuk dikembangkan ke daerah wisata. Realisasi kinerja layanan yang diinginkan adalah menciptakan model layanan dalam pelaksanaan layanan yang diharapkan kemudian harus ada upaya peningkatan berkelanjutan sesuai dengan standar kinerja yang berorientasi pada pelanggan dan bersinergi dengan berbagai elemen terutama di bidang layanan investasi	
6	Hermawan, Hary (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. <i>Jurnal pariwisata</i> . Vol. III, No.2, September 2016. Hal: 105-117.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata membawa dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal di Desa Nglanggeran, diantaranya : penghasilan masyarakat meningkat; meningkatkan peluang kerja dan berusaha; meningkatkan kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal; meningkatkan pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata. Sedangkan indikasi dampak negatif terhadap ekonomi lokal berupa kenaikan harga barang tidak ditemukan	Persamaan : Penelitian yang dilakukan melihat pengembangan pariwisata di desa Nglanggeran. Perbedaan : 1. Penelitian tersebut tidak menggunakan metode penta helix. 2. Penelitian tersebut juga melihat perekonomian desa.
7	Calzada, I. (2018). Local Entrepreneurship Through a Multistakeholders' Tourism Living Lab in the Post-Violence/Periphera	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1. Proses perumusan strategi yang begitu partisipatif. 2. Mengembangkan kewirausahaan lokal untuk mengatasi "tourism-phobia". 3. Memperbaharui identitas lokal.	Persamaan : Menggunakan pendekatan multi stakeholder atau penta helix. Perbedaan : 1. Penelitian ini

	<p>l Era in the Basque Country. <i>Regional Science Policy & Practice</i> 10(2): 1-16. In the Special Issue 'Local Entrepreneurship and tourism: policies and practices in peripheral areas'. DOI: 10.1111/rsp3.12130.</p>	<p>4. Menjembatani modal sosial untuk era pasca kekerasan di Negara Basque</p>	<p>melihat kebiasaan wisatawan yang berkunjung di Zumaia. 2. Metodologi penelitiannya menggunakan <i>Mixed Methods</i>.</p>
8	<p>Prabantarikso, M. I, Fahmi. A, M, Fauzi dan N, Nuryantomo. (2017). Strategi Collaborative model of BGAC+ for sustainable housing development in Indonesia. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 145 (2018) 012128. DOI: 10.1088/1755/145/1/012128</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Sustainable Housing</i> di Indonesia sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa <i>Sustainable Housing</i> dan pendekatannya untuk menerapkan ini di Indonesia. Namun untuk masalah perumahan sangat didominasi oleh pemerintah untuk peningkatan perekonomian dari pada memperhatikan sosial dan lingkungannya.</p>	<p>Persamaan : Meneliti tentang kolaborasi peta helix yang disebutnya dengan BGAC+</p> <p>Perbedaan: 1. Meneliti tentang <i>Sustainable Housing</i> 2. Penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif.</p>
9	<p>Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). The penta helix model of innovation in Oman: An HEI perspective. <i>Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management</i>, 12, 159-172.</p>	<p>Temuan dalam jurnal ini menyebutkan bahwa ekspektasi di dunia akademis terlalu tinggi. Pihak akademisi percaya bahwa semua inovasi secara awal mulai dari mereka. akademisi juga percaya bahwa mereka adalah salah satu organisasi yang merangsang dan memajukan inovasi meskipun kebanyakan program inovasi diprakarsai oleh pemerintah di Oman. Keterlibatan HEI dirasakan masih lemah. HEIs belum bisa dikatakan sebagai</p>	<p>Persamaan : Meneliti model penta helix</p> <p>Perbedaan : Fokus penelitian dibidang pendidikan.</p>

		kekuatan utama yang kuat dalam mempromosikan sistem inovasi. Terdapat kesadaran yang jelas tentang perlunya mengadopsi praktik-praktik terdepan dalam strategi dan manajemen inovasi, kurikulum dan penilaian, dukungan staf dan sistem penghargaan, pendanaan dan infrastruktur ICT, penelitian dan manajemen IP dan komunitas.	
10	Rani, D.P.M, 2014. <i>Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)</i> . Jurnal Politik Muda 3(3)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Sumenep memiliki kendala dari segi infrastruktur yang dimana hal tersebut masih belum mendukung dalam pengembangan pariwisata yang dikarenakan oleh masih kurangnya pemerintah untuk penyediaan infrastruktur, dapat dilihat bahwa fasilitas pendukung pariwisata masih terbatas misalnya jalan-jalan menuju tempat wisata yang akan dikunjungi masih banyak kerusakan cukup parah sehingga ini membuat para wisatawan kurang nyaman.	Persamaan : Meneliti tentang pengembangan pariwisata. Perbedaan : Penelitian tidak menggunakan metode penta helix
11	Iqbal, M dan Adawiyah, R.A (2018). Analisis kondisi existing dan pengembangan model bisnis dalam sektor pariwisata. (studi kasus pariwisata di kota wisata batu). <i>Jurnal Administrasi Bisnis</i> (JAB), Vol. 54, No. 1 Januari 2018. Hal: 169-178	Penelitian ini menari kesimpulan bahwasannya pertumbuhan sektor perekonomian yang terjadi yaitu melalui pengembangan <i>attractions, accessibilities, dan amenities</i> dalam sektor pariwisata. Peningkatan pertumbuhan usaha-usaha ini membutuhkan strategi khusus untuk mendesain suatu model bisnis yang tepat. Penyusunan model bisnis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan <i>Business Model Canvas</i> (BMC). BMC digunakan untuk memetakan model bisnis industri pariwisata di Kota Wisata Batu kedalam <i>ninebuilding blocks</i> kanvas model bisnis.	Persamaan : Meneleti tentang kepariwisataan Perbedaan : 1. Tidak menggunakan metode penta helix 2. Fokus penelitiannya di pengembangan bisnis.

12	<p>Simamora, K.R.; dan Sinaga, R.S. (2016). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata alam dan budaya di kabupaten Tapanuli Utara. <i>Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik</i> 4. Hal: 79-96.</p>	<p>Hasil penelitian ini dalam penelitian ini adalah peran pemerintah dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara dominan sebagai fasilitator dibandingkan dengan peran lainnya yaitu sebagai motivator dan dinamisator. Peran sebagai fasilitator ini terlihat terutama pada hal penyediaan sarana prasarana obyek yang sebagian besar masih ditanggung oleh Dinas, fasilitas penyaluran bantuan dana stimulan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan sebuah obyek wisata, upaya promosi obyek wisata, serta fasilitas yang diberikan pada pihak ketiga seperti investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usaha wisatanya di Kabupaten Tapanuli Utara.</p>	<p>Persamaan : Membahas terkait pengembangan pariwisata</p> <p>Perbedaan : Penelitian ini tidak menggunakan metode penta helix dalam pengembangannya.</p>
13	<p>Amalyah, R.; Hamid, D.; dan Hakim, L. (2016). Peran stakeholder pariwisata dalam pengembangan pulau samalona sebagai destinasi wisata bahari. <i>Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)</i>. Vol. 37, No. 1, Agustus 2016. Hal: 158-163</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pulau Samalona merupakan pulau yang memiliki potensi bahari sehingga kegiatan utama yang dilakukan wisatawan yaitu <i>snorkeling</i>. Pengembangan Pulau Samalona melibatkan <i>stakeholder</i> pariwisata yang terdiri dari pemerintah melalui Disparekrif Kota Makassar, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat lokal Pulau Samalona. Peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan Pulau Samalona berupa penyediaan sarana prasarana, pembinaan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat lokal, promosi, dan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>). Faktor pendukung pengembangan Pulau Samalona adalah keterlibatan masyarakat lokal Pulau Samalona dalam pengelolaan dan dukungan</p>	<p>Persamaan : Meneliti tentang peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan pariwisata.</p> <p>Perbedaan : Penelitian hanya melihat peran pemerintah, masyarakat dan swasta, tidak melihat peran dari media dan juga akademisi.</p>

		<p>pihak swasta. Faktor penghambat pengembangan Pulau Samalona yaitu peran Disparekraf belum maksimal, masyarakat lokal sebagai pelaku wisata belum profesional, dan kurangnya koordinasi dari berbagai <i>stakeholder</i>.</p>	
14	<p>Suryawan, A. (2016). Peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sendang arum dalam pengembangan potensi pariwisata (studi kasus di desa wisata tlahap kecamatan tledung kabupaten temnggung). <i>Jurnal elektronik mahasiswa PLS</i>. Vol, 5. No, 6. Tahun 2016. Hal: 143-152</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran Pokdarwis Sendang Arum; a. Memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi wisata; b. Mengelola pariwisata; c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota serta masyarakat; d. Menjalani kerjasama dengan organisasi lain. 2) Faktor pendukung Pokdarwis Sendang Arum, yaitu: dukungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia, peninggalan kebudayaan Mataram Kuno dan kearifan lokal yang tetap dilestarikan. Sedangkan Faktor penghambatnya, yaitu: Kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran serta aktualisasi masyarakat terhadap sapta pesona. 4) Dampak peran Pokdarwis Sendang Arum, yaitu: Salah satu Desa Wisata terbaik, pendapatan Desa Wisata Tlahap dan jumlah kunjungan wisatawan meningkat, serta dapat membuka lapangan pekerjaan.</p>	<p>Persamaan : Meneliti tentang pengembangan pariwisata.</p> <p>Perbedaan : Hanya fokus melihat peran dari Kelompok Sadar Wisata (IPokdarwis) saja.</p>

15	Iqbal, M.; dan Pratama, R. (2018). Analisis pemetaan jejaring stakeholder pariwisata di kota batu dengan menggunakan metode social network analysis (SNA). <i>Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)</i> . Vol. 54, No. 1 Januari 2018. Hal: 179-188	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada peta jejaring <i>stakeholder</i> pariwisata terdapat beberapa aktor yang memiliki peran penting dalam jaringan. Berdasarkan ukuran <i>degree centrality, travel agent</i> menjadi aktor yang memiliki peran penting dalam jaringan. Sedangkan ukuran <i>closeness centrality</i> terdapat tiga aktor yang memiliki peran dominan yaitu makelar, POKDARWIS, dan ASITA. Sedangkan ukuran <i>betweensscentrality</i> , Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta <i>travel agent</i> mampu berperan sebagai fasilitator bagi aktor lain dalam jaringan.	<p>Persamaan : <i>Stakeholder</i> yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.</p> <p>Perbedaan : 1. Tidak melihat <i>stakeholder</i> dalam penta helix 2. Menggunakan metode <i>social network analysis</i> (SNA)</p>
----	--	--	--

Sumber : Data Olahan Penulis, 2018.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka diatas, terdapat beberapa poin yang membedakan antara penelitian terdahulu dan juga penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan pada salah satu desa wisata yang cukup populer hingga mancanegara,
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Penta Helix* atau *ABCGM* yang masih sangat jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya di bidang pariwisata dikarenakan pendekatan *Penta Helix* banyak digunakan untuk melihat tingkat perekonomian di daerah atau wilayah tertentu, ditambah dengan adanya *traveler* yang juga ikut berpengaruh dalam pengembangan pariwisata, sehingga rumus *ABCGM* dalam penta helix berubah menjadi *ABCGM+* dikarenakan *traveler* juga

merupakan salah satu *stakeholder* penunjang dalam pengembangan pariwisata, dan

3. Penelitian terkait pengembangan pariwisata sangat perlu untuk diteliti agar peneliti selanjutnya mempunyai pemahaman atau referensi lain terkait *ABCGM+* khususnya di bidang pengembangan pariwisata.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Konsep Stakeholder

Stakeholder diartikan sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (secara positif atau negatif) oleh program pembangunan (Hetifah, 2003). Lebih lanjut (Rahim, 2012) menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya melibatkan tiga *stakeholder* yang saling terkait yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Menurut Nugroho, dkk (2014) *stakeholder* dalam program pembangunan atau pengembangan dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu :

1. *Policy creator, stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
2. Koordinator, *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat.
3. Fasilitator, *stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
4. *Implementer, stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
5. *Akselerator, stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya

Stakeholder menurut Yoeti (1993) merupakan bagian dari pelaku wisata yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Wisatawan, memiliki ragam motif, minat, ekspektasi, karakteristik sosial, ekonomi, dan sebagainya. Keragaman tersebut menjadikan mereka sebagai pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata. Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan.
2. Industri pariwisata (penyedia jasa). Artinya semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata.
3. Pendukung jasa wisata, kelompok ini adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk tersebut. seperti, jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, usaha bahan pangan, penjualan bahan bakar mentah (BBM), dan lainnya.
4. Pemerintah, memiliki otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukan bagi infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Selain itu, bertanggungjawab dalam menentukan arah yang dituju dalam perjalanan pariwisata. kebijakan makro yang di tempuh pemerintah merupakan panduan bagi *stakeholder* yang lain dalam memainkan peran masing-masing.
5. Masyarakat lokal, terutama penduduk asli yang bermukim dikawasan wisata, menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata, karena merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata.

Jika dilihat dari posisi dan juga pengaruhnya, *stakeholder* dapat dibedakan menjadi tiga kelompok menurut Debora (2006) yang meliputi :

1. *Stakeholder Primer*
Merupakan *stakeholder* yang memiliki kaitan yang kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, yang mana terbagi dalam dua kelompok yaitu, masyarakat dan tokoh masyarakat, dan pihak manager public yang meliputi lembaga/badan publik yang bertanggungjawab dalam pengambilan dan implementasi atau keputusan.
2. *Stakeholder Sekunder*
Adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program dan proyek. Tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap *stakeholder* dan keputusan legal pemerintah. Mereka meliputi:

- Aparat pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggungjawab langsung.
 - Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.
 - LSM dan pers setempat yang bergerak dibidang yang sesuai dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul dan memerlukan perhatian.
 - Perguruan tinggi, kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah.
 - Sektor swasta yang terkait.
3. *Stakeholder Kunci*
- Merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* kunci yang dimaksudkan adalah unsure eksekutif sesuai levelnya, legislative dan instansi. Yang mana ini meliputi :
- Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
 - DPR, DPR provinsi dan DPR kabupaten/kota.
 - Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.

Stakeholder pada dasarnya menjadi pusat dalam sebuah pengembangan karena mempunyai tujuan dan visi yang sama. Kolaborasi yang ada antara *stakeholder* adalah dalam bentuk rumusan visi bersama, keterlibatan pemangku kepentingan, sosialisasi visi dan misi dan tingkat pemahaman visi dan misi. Secara umum, kolaborasi dalam visi bersama adalah *top down* karena dokumen visi-misi adalah produk dari pemerintah, meskipun proses perumusan melibatkan mayoritas pemangku kepentingan. Pemerintah telah menyiapkan konsep-konsep untuk diketahui oleh para pemangku kepentingan dan kemudian untuk dapat merespon agar menjadi formula standar (Zaenuri, 2015).

2.2.2 Definisi Collaborative Governance

Menurut Wanna (Zaenuri, 2016) menyatakan bahwa *collaborative* (kolaborasi) melibatkan beberapa dimensi sebagai berikut yaitu:

1. Kolaborasi dapat melibatkan peran pengawasan, pemeriksaan, menarik bersama-sama dan koordinasi pusat,
2. Kolaborasi bisa melibatkan kerjasama untuk membangun kesamaan, meningkatkan konsistensi dan menyelaraskan kegiatan antara aktor,
3. Kolaborasi dapat menjadi proses negosiasi, yang melibatkan kesiapan untuk berkompromi dan membuat *trade-off*,
4. Kolaborasi dapat melibatkan kekuasaan pemaksaan, kemampuan untuk memaksa hasil atau memaksakan preferensi sendiri,
5. Kolaborasi dapat melibatkan komitmen dan niat masa depan, kemungkinan berperilaku, perencanaan atau persiapan untuk menyelaraskan kegiatan.
6. Kolaborasi dapat menumbuhkan komitmen pribadi untuk kegiatan, tujuan organisasi atau tujuan yang lebih strategis, pengembangan motivasi internal, keputusan, dan keterlibatan.

Menurut Carpenter dalam buku yang diterbitkan oleh WWF, kolaborasi memiliki 7 (tujuh) karakteristik, yang sebagai berikut: (Fairuza, 2017)

1. Partisipasi bersifat inklusif (tidak dibatasi) dan tidak hierarki
2. Partisipasi bertanggungjawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan
3. Adanya tujuan yang jelas dari pendefinisian masalah
4. Partisipasi saling membagi pengetahuannya satu sama lain (*educating each other*)
5. Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan
6. Partisipasi berbagai peran dan tanggungjawab dalam pengimplementasian solusi
7. Partisipasi selalu mengetahui perkembangan yang ada

Menurut Bevir (Zaenuri, 2016) menjelaskan bahwa *governance* adalah bentuk transformasi sistem tata kelola pemerintah yang meliputi beberapa aspek yang dimulai dari perubahan sistem hirarki dan jaringan pasar kemitraan, interkoneksi administrasi dengan masyarakat sipil, perubahan aktivitas pemerintah dari negosiasi dan diplomasi, serta keterlibatan lembaga non negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dwiyanto (Nurhaeni, 2010) menjelaskan bahwa dimensi pertama dari *governance* adalah dimensi kelembagaan, yang menjelaskan bahwa *governance* merupakan sebuah sistem yang melibatkan banyak pelaku (*multi stakeholders*), baik dari pemerintah maupun dari luar pemerintah dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk menanggapi masalah dan kebutuhan publik. Dimensi kedua dari *governance* adalah nilai yang menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan. Nilai-nilai administrasi publik yang tradisional seperti efisiensi dan efektifitas telah bergeser menjadi nilai keadilan sosial, kebebasan dan kemanusiaan.

Collaborative berarti melibatkan beberapa aktor yang saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu, aktor-aktor ini bekerja tidak hanya dalam satu sektor melainkan beberapa sektor. Sedangkan *governance* merupakan suatu sistem pemerintahan (Bingham, 2008). Sehingga dapat dimaknai bahwa *collaborative governance* adalah adanya beberapa aktor atau sektor-sektor tertentu baik dari lembaga pemerintah atau non pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya (Bingham, 2010) menyebutkan bahwa *collaborative governance* hadir sebagai alternatif dari sistem tradisional sebelumnya dan juga sebagai alternatif dari kegagalan sistem sebelumnya (Ansell dan Gash, 2008). Hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kehadiran *collaborative governance* untuk menyempurnakan sistem-sistem sebelumnya yang tidak terimplementasi dengan baik.

Gagasan tentang *collaborative governance* pada umumnya mengacu terhadap sekelompok pemangku kepentingan yang saling bergantung, biasanya dari berbagai sektor, yang bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan untuk mengatasi masalah atau situasi yang kompleks dan beraneka ragam (Choi dan Robertson, 2013).

Collaborative governance tidak hanya bertujuan untuk memenuhi gagasan yang samar tentang pengambilan keputusan yang lebih inklusif, tetapi lebih kepada “untuk melibatkan” cara mengetahui “yang berbeda dalam proses pemecahan masalah yang berkelanjutan” (Feldman dkk, 2006), sehingga lebih lanjut dikatakan oleh Doberstain (2016) mengingat bahwa itu adalah alasan di balik *collaborative governance*, kita mungkin berharap bahwa pegawai negeri dan aktor masyarakat sipil melihat masalah kebijakan dan solusi berbeda, sehingga hasil pemerintahan kolaboratif dalam keputusan yang berbeda dibuat daripada yang akan terjadi jika di bawah pengambilan keputusan birokrasi tradisional (yang tidak termasuk aktor masyarakat sipil).

Menurut Tang dan Masmanian (2008) mendefinisikan *Collaborative governance* sebagai sebuah konsep yang mendeskripsikan proses membangun, mengemudi, memfasilitasi, mengoperasikan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral untuk menangani masalah kebijakan publik yang tidak dapat dengan mudah ditangani oleh satu organisasi atau sektor publik sendiri. Pengaturan ini ditandai dengan upaya bergabung, harapan timbal balik, dan partisipasi sukarela antara entitas otonom resmi, dari dua atau lebih

sektor publik, profit dan nonprofit dalam rangka meningkatkan (membangun) atribut unik dan sumberdaya dari masing- masing.

Menurut Ansell and Gash (2008) *Collaborative governance* merupakan sebuah pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Berdasar dari pengertian tersebut, lebih lanjut Ansel dan Gash menyebutkan bahwa terdapat enam kriteria terkait dengan *collaborative governance* yaitu :

1. Forum diprakarsai oleh lembaga atau lembaga publik,
2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state,
3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya "berkonsultasi" oleh lembaga publik,
4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif,
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktek), dan
6. Fokus kolaborasi kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau publik pengelolaan.

DeSeve (2007) berpendapat bahwa tolak ukur untuk menilai keberhasilan kolaborasi dalam sebuah program dapat diukur melalui beberapa item yang dijadikan sebagai landasan *calloborative governance* yang dijelaskan sebagai berikut (Sudarmo, 2011):

1. Tipe jenis struktur jaringan
Mendesripsikan secara konseptual keterkaitan antar elemen satu dengan yang lain menyatu secara bersamaan untuk menjelaskan beberapa unsur fisik jaringan, yang kaitnya dengan bentuk *networked structure*, seperti *clusture* dan *spoke* yang digunakan.

2. **Komitmen terhadap tujuan**
 Komitmen terhadap tujuan menjelaskan bahwa sebuah kerjasama atau jaringan perlu diadakan, hal tersebut karena untuk perhatian dan komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut adalah tujuan-tujuan positif yang dituliskan dalam misi umum sebuah organisasi pemerintahan.
3. **Adanya saling percaya diantara para pelaku/peserta yang terangkai dalam jaringan**
 Sebuah jalinan kepercayaan antara semua partisipan dalam penyampaian informasi maupun usaha dari *stakeholder* lainnya dalam sebuah jaringan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.
4. **Governance**
 Salah satu indikator yang didalamnya memuat rasa kepercayaan antara semua pihak atau para pelaku, terdapat batasan-batasan siapa saja yang boleh terlibat dalam proses pelaksanaan program ataupun kebijakan publik, terdapat aturan yang jelas yang telah disepakati bersama, dan adanya kebebasan dalam menentukan bagaimana kolaborasi yang akan dijalankan.
5. **Akses terhadap kekuasaan**
 Sebuah tolak ukur keberhasilan yang memiliki prosedur atau ketentuan yang jelas dan diterima secara luas. Dari kebanyakan kolaborasi memberikan otoritas untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan dalam menjalankan tugasnya.
6. **Pembagian akutanbilitas responbilitas**
 Dalam terkait dengan penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholder* lain dengan berbagai keputusan yang diputuskan bersama kelompok anggota jaringan, dan dengan demikian dibuatlah pertanggung jawaban untuk mencapai hasil yang diinginkan setelah pelaksanaan dari keputusan yang sudah dibuatkan.
7. **Berbagi informasi**
 Sebuah akses untuk para anggota, baik dalam perlindungan privasi, dan pembatasan akses bagi yang tidak termasuk anggota selama itu masih diteriam oleh seluruh anggota yang terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi. Kemudahan yang diberikan untuk mengakses informasi mencakup dalam hal sistem, *software*, dana beberapa hal prosedur yang memudahkan dan aman untuk mengakses informasi.
8. **Akses Terhadap Sumberdaya**
 Ketersediaan sumber daya alam, manusia teknis, dan keuangan yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa penjelasan terkait dengan *collaborative governance* dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan sebuah jaringan atau program perlu adanya aktor-aktor yang saling bersinergi memberikan motivasi,

semangat, dan faktor pendukung lain untuk mensukseskan rancangan yang telah disusun.

2.2.3 Model *Penta Helix* (ABCGM)

Model *Penta Helix* didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan diantaranya adalah akademisi, komunitas, bisnis (ekonomi), pemerintah dan media. Model ini sangat berguna untuk masalah daerah pemangku kepentingan yang mana setiap *stakeholder* mewakili berbagai kepentingan daerahnya masing-masing. *Penta Helix* (Lindmark: 2009) merupakan perluasan dari strategi tiga helix dengan melibatkan berbagai elemen lembaga masyarakat atau *non-profit* dalam rangka mewujudkan inovasi. Melalui kerjasama sinergis diharapkan untuk mewujudkan sebuah inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berinteraksi secara sinergis. Lima komponen dari *Penta Helix* tersebut memiliki kontribusi yang saling berkaitan diantaranya:

1. Akademisi (*academics*) adalah sumber daya pengetahuan. Mereka memiliki konsep, teori dalam mengembangkan pariwisata untuk mendapatkan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan.
2. Bisnis (*business*) adalah suatu entitas yang memiliki aktivitas dalam mengolah barang atau jasa untuk menjadi berharga.
3. Komunitas (*community*) adalah orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan masalah atau kasus yang berkembang.
4. Pemerintah (*government*) adalah salah satu stakeholders yang memiliki regulasi dan reponsibility dalam mengembangkan pariwisata.
5. Media (*media*) adalah pemangku kepentingan yang memiliki informasi lebih untuk mengembangkan pariwisata dan memainkan peran yang kuat dalam mempromosikan pariwisata.

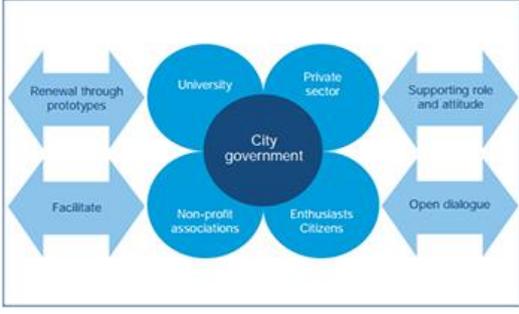
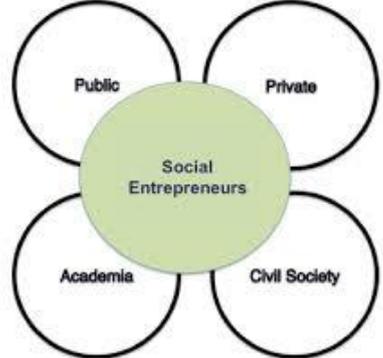
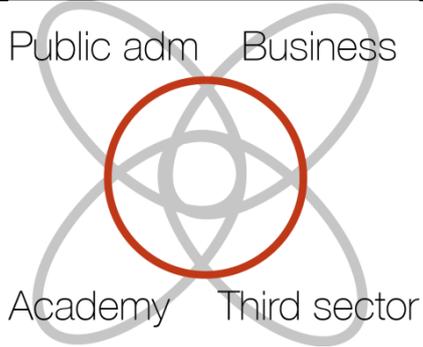
Terdapat beberapa pendapat mengenai lima aktor dalam model *Penta Helix*. Namun model *Penta Helix* lebih dikenal dengan konsep atau rumusan *ABCGM* yaitu *Academician, Business, Community, Government, dan Media* (Slamet dkk, 2017). Kunci utama kesuksesan inovasi ini adalah adanya sinergi dan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menjalankan. Model *Penta Helix* sangat berguna untuk mengelola kompleksitas berbasis aktor. Namun untuk mengembangkan pariwisata yang lebih kompleks lagi, terdapat satu hal lagi yang harus dipertimbangkan yaitu wisatawan atau pengunjung (*traveler*). *Traveler* memiliki kontribusi yang besar dalam hal memberikan *review* terkait objek wisata yang mereka kunjungi. Maka dalam hal ini selain melihat kolaborasi dari *penta helix*, penelitian ini juga akan melihat keterlibatan wisatawannya dalam hal pengembangan pariwisata. Sehingga konsep *penta helix* yang di kenal dengan rumus *ABCGM* akan di tambah *traveler* akan menjadi *ABCGM+*.

Lebih lanjut (Soemaryani, 2016; Rampersad, 2017) menyebutkan bahwa model *Penta Helix* merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait di dalam mendukung seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan dan bahwa kolaborasi *Penta Helix* mempunyai peran penting untuk bermain didalam mendukung tujuan inovasi bersama dan *Penta Helix* berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah.

Selanjutnya terdapat beberapa model *penta helix* yang di gambarkan oleh (Bjork, 2015; Calzada, 2016; PWC, 2005) yang secara keseluruhan

membahas kelima *stakeholder* yang berperan serta dan *stakeholder* yang begitu dominan didalam kolaborasi yang terjalin.

Tabel 2.2
Model *Penta Helix*

No	Penulis	Model	Keterangan
1	PWC (2005)		Terdapat lima aktor dalam pengembangan penta helix diantaranya adalah pemerintah kota universiats, sektor swasta, asosiasi nirlaba, masyarakat. Peran sentralnya berada ditangan pemerintah kota.
2	Calzada (2016)		Lima aktor yang tergabung yaitu publik, swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan pengusaha sosial. Peran sentralnya dikuasai oleh pengusaha sosial.
3	Bjork (2015)		Lima aktor yang di maksud adalah administrasi public, bisnis, akademisi, sektor ketiga, wirausahwan yang aktif. Peran sentral dalam kolaborasi ini bebas untuk setiap sektor tanpa tekanan.

Sumber: Olahan Penulis, 2018.

Jika disimpulkan berdasarkan pengertian diatas model *Penta Helix* dapat dikatakan bahwa sebuah model yang dirancang khusus untuk mendukung pengembangan sebuah inovasi baru yang sedang atau yang telah

berlangsung agar mendapatkan dukungan dari berbagai *stakeholder* untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga *Penta Helix* dirasa cukup perlu untuk mendukung sebuah perkembangan inovasi baik dibidang pariwisata, ekonomi dan lain sebagainya.

2.2.4 Konsep Pengembangan Pariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, mengatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan dukungan fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Suwantoro (Murdiastuti, dkk. 2014) menyatakan bahwa “pariwisata adalah suatu perubahan tempat tinggal seseorang diluar tempat tinggalnya karena satu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah yang mana perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan dan keinginan untuk mengetahui”.

Pariwisata Wahab (Pendit, 1999) merupakan “salah satu jenis industri baru mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, ia juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri”.

Pengertian pariwisata menurut Norval (Muljadi dan Nurhayati, 2002) adalah “keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan

pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota, atau wilayah tertentu”. Menurut definisi yang lebih luas yang dikemukakan oleh Kodhyat (1983) “pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu”. Selanjutnya menurut Musanef (1995) mengartikan “pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati perjalanan bertamasya dan berekreasi”.

Menurut Yoeti (2008) pariwisata harus memenuhi empat kriteria di bawah ini, yaitu:

1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu biasanya tinggal,
2. Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau dtw yang dikunjungi,
3. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan,
4. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Menurut Spilane (1987), pariwisata adalah “perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu”. Ditambah pula bahwa pariwisata terbagi atas beberapa jenis, yaitu: (1) pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*); (2) pariwisata

untuk berekreasi (*recreation tourism*); (3) pariwisata untuk budaya (*culture tourism*); (4) pariwisata untuk olah raga (*sport tourism*); (5) pariwisata untuk urusan usaha dagang (*business tourism*); dan (6) pariwisata untuk konvensional (*conventional tourism*).

Dalam pengembangan pariwisata, harus memperhatikan unsur-unsur pokok yang berguna untuk menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata. Menurut Suwantoro (2004), ada 5 (lima) unsur pokok yang harus diperhatikan. Unsur-unsur pokok tersebut terdiri dari :

1. Obyek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata atau obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasarkan pada :

- a. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- b. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- c. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka.
- d. Adanya sarana atau prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.
- e. Obyek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan dan sebagainya.
- f. Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

2. Prasarana Wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun sesuai dengan lokasi dan kondisi obyek wisata yang bersangkutan. Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu obyek wisata yang akhirnya akan meningkatkan daya tarik obyek wisata itu sendiri.

Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata diperlukan koordinasi yang mantap antara instansi terkait bersama dengan instansi pariwisata di berbagai tingkat.

3. Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun obyek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah saranawisata yang harus disediakan, sedangkan secara kualitatif ialah menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan.

4. Tata Laksana (Infrastruktur)

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas dan di bawah tanah seperti :

- a. Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang membantu sarana perhotelan atau restoran.
- b. Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai.
- c. Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi obyek-obyek wisata.
- d. Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapatkan informasi maupun mengirimkan informasi secara cepat dan tepat.
- e. Sistem keamanan atau penagawasan yang memberikan kemudahan di berbagai sektor bagi para wisatawan.

5. Masyarakat (Lingkungan)

a. Masyarakat

Masyarakat di sekitar obyek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Hal ini disebabkan karena masyarakat di sekitar obyek wisata adalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh wisatawan.

b. Lingkungan

Lingkungan alam di sekitar obyek wisata perlu diperhatikan kelestariannya agar tidak rusak dan tercemar. Sehingga perlu adanya aturan dan persyaratan dalam pengelolaan suatu obyek wisata.

c. Budaya

Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di suatu obyek wisata merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu lingkungan budaya tidak boleh tercemar oleh budaya asing, tetapi harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang mengesankan bagi setiap wisatawan yang berkunjung.

Selanjutnya Truong (2002) juga mengungkapkan bahwa untuk mengembangkan pariwisata setidaknya kawasan tersebut harus memiliki beberapa hal, yaitu:

1. *Attractions*

Daya tarik wisata yang terjaga dan memiliki daya tarik bagi pengunjung wisata, baik wisata alam atau kawasan yang dibudidayakan untuk menarik minat wisatawan.

2. *Activities*

Ruang gerak yang begitu mudah sehingga wisatawan/pengunjung merasa leluasa dan nyaman dalam melakukan perjalanan di sekitar objek wisata.

3. *Accommodation*

Tersedianya segala kebutuhan pariwisata terutama tempat tinggal apabila wisatawan ingin bermalam di daerah wisata. Tidak hanya tempat tinggal tetapi juga tersedianya tempat makan untuk pengunjung objek wisata.

4. *Amenity*

Fasilitas yang terdapat dikawasan wisata seperti tempat ATM/tempat penukaran uang, toko oleh-oleh, tempat ibadah dan sebagainya.

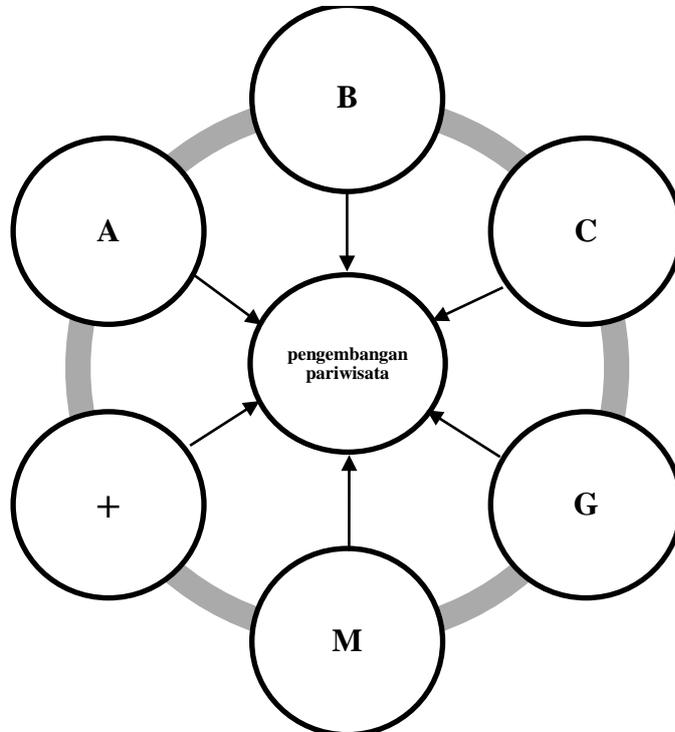
5. *Accessibility*

Kemudahan untuk menuju lokasi wisata yang menunjang perjalanan agar tidak menghabiskan waktu yang panjang untuk sampai pada lokasi tujuan.

Terakhir Joyosuharto (1995) juga menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu: (1) menggalakkan ekonomi; (2) memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup; (3) memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Selanjutnya menurut Suryono (2004) strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: Kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana.

Strategi selalu berkaitan dengan 3 hal yaitu tujuan, sarana, dan cara. Oleh karena itu, strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

2.3 Kerangka Berfikir



Keterangan :

A :Acamdemics

B :Bussinees

C :Community

G :Government

M :Media

+ :Traveler

2.4 Definisi Konseptual

1. *Stakeholder* adalah suatu kelompok yang mempunyai tujuan yang sama dalam menentukan sesuatu hal.
2. *Collaborative governance* adalah bentuk kerjasama yang bukan hanya didominasi oleh lembaga pemerintahan, namun juga melibatkan *privat sector* yang pada akhirnya bermusyawarah untuk menentukan langkah yang akan dilakukan untuk kedepannya.

3. Model *ABCGM+* adalah model kerjasama yang melibatkan beberapa sektor untuk mewujudkan rencana pengembangan sebuah inovasi. Sektor yang dimaksud adalah pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, media dan wisatawan.
4. Pengembangan Pariwisata adalah meningkatkan daya tarik pengunjung untuk tetap berkunjung ke tempat wisata yang telah mereka kunjungi dikarenakan, transportasi, tempat belanja, tempat wisata, penginapan dan lain sebagainya memberikan pelayanan yang menyenangkan.

2.5 Definisi Operasional

Adapun indikator yang akan digunakan dalam penelitian terkait Kolaborasi Penta Helix Dalam Pengembangan Pariwisata ini adalah sebagai berikut :

Variabel	Indikator	Parameter
<i>ABCGM+</i>	1. <i>Academic</i>	a. Adanya komitmen untuk pengembangan pariwisata b. Memberikan sebuah konsep kepariwisataan yang sesuai dengan perturan perundangan.
	2. <i>Business</i>	a. Adanya akses jaringan yang terjalin untuk pengembangan pariwisata. b. Memperluas kapasitas perekonomian di daerah tempat wisata
	3. <i>Community</i>	a. Sebagai wadah tukar pendapat serta aspirasi dari masyarakat b. Menghubungkan pemangku kepentingan untuk pengembangan pariwisata
	4. <i>Government</i>	a. Konseptor regulasi dalam pengembangan pariwisata b. Mengkoordinasi seluruh pemangku kepentingan

	5. <i>Media</i>	a. Akses informasi sebagai wujud pengembangan pariwisata b. Mempromosikan daerah tujuan wisata
	6. <i>Traveler</i>	a. Membagikan pengalaman selama berkunjung ke objek wisata tersebut. b. Memberikan masukan kepada pengelola wisata untuk meningkatkan pesona objek wisata.
Pengembangan Pariwisata	1. <i>Attractions</i>	a. Adanya daya tarik alam yang sangat menarik untuk dikunjungi. b. Adanya keunikan khas daerah yang terjaga di kawasan wisata c. Terdapat tradisi yang hanya dilakukan oleh masyarakat setempat
	2. <i>Activities</i>	a. Adanya kendaraan penunjang untuk mengunjungi kawasan wisata b. Adanya rasa nyaman dan aman ketika berada di kawasan wisata c. Terdapat macam-macam pilihan untuk mengunjungi objek wisata di daerah tersebut
	3. <i>Accommodation</i>	a. Adanya petugas keamanan di sekitar objek wisata b. Terdapat rumah makan atau restoran c. Terdapat pendopo untuk istirahat d. Adanya penginapan ketika ingin bermalam
	4. <i>Amenity</i>	a. Adanya tempat pengambilan uang b. Adanya toko yang menjual pernak-pernik khas daerah wisata c. Terdapat tempat ibadah di kawasan pariwisata
	5. <i>Accessibility</i>	a. Terdapat website khusus daerah pariwisata b. Terdapat jalur tempuh yang bisa dilalui dan aman c. Terdapat aliran listrik untuk penerangan d. Adanya sumber air yang bisa digunakan untuk kebutuhan tertentu e. Adanya fasilitas internet untuk keperluan tertentu